

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi Indonesia dalam proses pembangunan nasional. Sebagai negara kesatuan yang tengah berada dalam tahap transisi dari negara berkembang menuju negara maju, Indonesia dituntut untuk tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan tersebut berlandaskan pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai acuan global yang ditetapkan oleh *United Nations*, yang salah satu tujuan utamanya adalah pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dasar saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

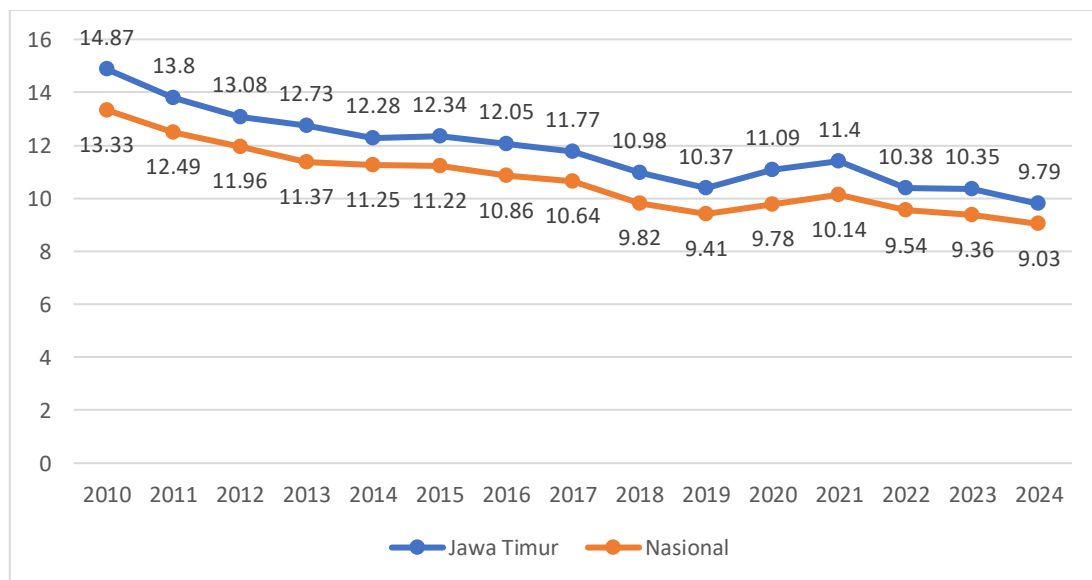
Fenomena kemiskinan merupakan permasalahan mendasar dalam perekonomian yang masih dihadapi oleh hampir seluruh negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia yang tingkat kemiskinannya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan sekitarnya. Kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi ketika individu atau kelompok masyarakat belum mampu memenuhi standar kebutuhan hidup minimum yang layak secara ekonomi. Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh besaran pendapatan yang diperoleh. Pendapatan tersebut akan berada pada kondisi optimal apabila kesempatan kerja dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sebaliknya, keterbatasan akses terhadap pekerjaan atau tingginya tingkat pengangguran akan menurunkan

pendapatan, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat (Sutikno *et al.*, 2019).

Menurut Arsyad (2010), kemiskinan di Indonesia tidak dapat dipahami hanya dari satu dimensi, melainkan bersifat multidimensional. Kemiskinan tersebut tercermin melalui berbagai aspek, baik aspek primer maupun sekunder. Aspek primer berkaitan dengan keterbatasan kepemilikan aset serta rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan, sementara aspek sekunder mencakup keterbatasan akses terhadap jaringan sosial, sumber pembiayaan, dan sarana informasi. Menurut Kuncoro, (2006), kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan dua konsep yang berbeda dan tidak dapat disamakan. Perbedaan tersebut penting untuk diperjelas karena kemiskinan berkaitan dengan pemenuhan standar hidup minimum secara absolut bagi kelompok masyarakat tertentu, sementara ketimpangan mencerminkan perbedaan tingkat kesejahteraan secara relatif di antara seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Sudantoko, (2009), kemiskinan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan absolut menggambarkan kondisi ketika tingkat pendapatan individu berada di bawah standar kelayakan hidup yang ditetapkan melalui garis kemiskinan, yang umumnya diukur berdasarkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Selanjutnya, kemiskinan relatif berkaitan dengan kondisi ketimpangan yang muncul akibat hasil pembangunan yang belum terdistribusi secara merata, sehingga sebagian kelompok masyarakat tertinggal dibandingkan kelompok lainnya. Jenis kemiskinan ini tidak ditentukan oleh garis kemiskinan, melainkan dipengaruhi oleh persepsi dan kondisi relatif antarindividu atau

kelompok dalam masyarakat. Sementara itu, kemiskinan struktural merujuk pada kemiskinan yang timbul akibat faktor-faktor struktural, termasuk sistem sosial, ekonomi, serta nilai dan kebiasaan budaya di suatu wilayah, yang secara tidak langsung membatasi kemampuan individu untuk meningkatkan taraf hidup (Vera Ainunnisa, 2019).



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2010-2024

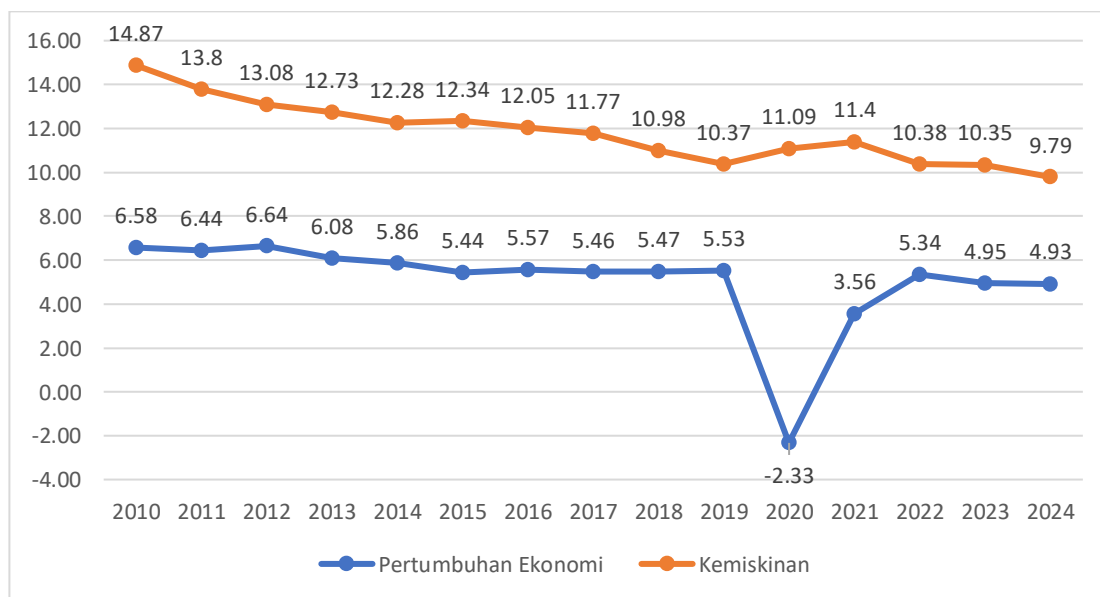
Berdasarkan gambar 1.1 memperlihatkan persentase penduduk miskin antara Provinsi Jawa Timur dan nasional selama periode 2010-2024. Dapat diamati bahwa kemiskinan di Provinsi Jawa Timur cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan nasional, pada tahun 2010, kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebesar 14,87 persen, sedangkan nasional 13,33 persen. Tren penurunan ini terus berlangsung hingga tahun 2019, di mana kemiskinan Jawa Timur mencapai 10,37 persen dan tingkat nasional 9,41 persen. Memasuki periode 2020-2021, terjadi peningkatan kemiskinan akibat

pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat. Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur meningkat menjadi 11,09 persen, sementara itu kemiskinan di Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 9,78 persen. Memasuki masa pasca pandemi, tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan, tahun 2024 kemiskinan Jawa Timur turun menjadi 9,79 persen, sedangkan tingkat nasional mencapai 9,03 persen.

Meskipun mengalami penurunan, tingkat kemiskinan di Jawa Timur masih berada di atas rata-rata nasional. Selain itu, Jawa Timur juga merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya jumlah penduduk serta tingginya tingkat kemiskinan menyebabkan Jawa Timur masih menghadapi permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks dibandingkan dengan provinsi lainnya. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Timur menjadi sangat penting karena keberhasilannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi memiliki peranan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan karena mencerminkan proses peningkatan kapasitas produksi serta pendapatan dalam perekonomian yang berlangsung secara berkelanjutan.

Menurut Sukirno, (2010), pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan aktivitas perekonomian yang ditandai dengan bertambahnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat, sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan. Akan tetapi, peningkatan kapasitas produksi yang terjadi akibat bertambahnya faktor-faktor produksi tidak selalu diikuti oleh kenaikan jumlah

output barang dan jasa dalam proporsi yang sama. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kemampuan suatu perekonomian dalam menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Suatu wilayah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila balas jasa riil yang diterima dari penggunaan faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam, pada suatu periode tertentu menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan pendapatan riil masyarakat pada periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya menekankan pada peningkatan output semata, tetapi juga pada kemampuan perekonomian dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan (Rakhmawan & Aji, 2022).



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2024

Gambar 1.2 memperlihatkan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2010–2024. Pada periode 2010–2019,

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur cenderung stabil pada kisaran 5 hingga 6 persen, yang diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan secara konsisten. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut relatif mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan. Namun, pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi yang tajam sebesar -2,33 persen, yang bertepatan dengan kenaikan tingkat kemiskinan. Hal ini menandakan bahwa adanya perlambatan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Pada periode 2021–2024, meskipun pertumbuhan ekonomi kembali positif dan menunjukkan tren pemulihan, penurunan tingkat kemiskinan berlangsung lebih lambat dibandingkan periode sebelum 2020. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi pascakrisis belum sepenuhnya inklusif, sehingga manfaat pertumbuhan belum secara optimal dirasakan secara inklusif.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dapat mendorong meningkatnya investasi, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa mendorong kebutuhan modal dari para investor untuk membiayai kegiatan produksi di suatu daerah. Aktivitas investasi tersebut pada akhirnya akan meningkatkan output ekonomi dan akan menurunkan kemiskinan (Mimi Cahyani & Laili Hurriati, 2025). Investasi memiliki peran yang sangat penting dalam menurunkan kemiskinan serta mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Setiap pemerintah daerah berupaya secara maksimal untuk menarik minat investor agar dapat menanamkan modalnya dan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia di daerah (Riyadi & Woyanti, 2022). Peningkatan investasi berperan penting

dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi memungkinkan peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya pada kelompok dan wilayah yang sebelumnya berada pada tingkat kesejahteraan rendah, sehingga berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin (Alim & Harsono, 2025).

Tabel 1.1 Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2024

Tahun	PMDN (Milyar Rupiah)	PMA (Juta US\$)
2010	8084.1	1769.2
2011	9687.5	1312.0
2012	21520.3	2298.8
2013	34848.9	3396.3
2014	38132.0	1802.5
2015	35489.8	2593.4
2016	46331.6	1941.0
2017	45044.5	1566.7
2018	33333.1	1333.4
2019	45452.7	866.3
2020	55660.6	1575.5
2021	52552.2	1849.2
2022	65355.9	3134.0
2023	74937.4	4741.0
2024	92410.1	3661.1

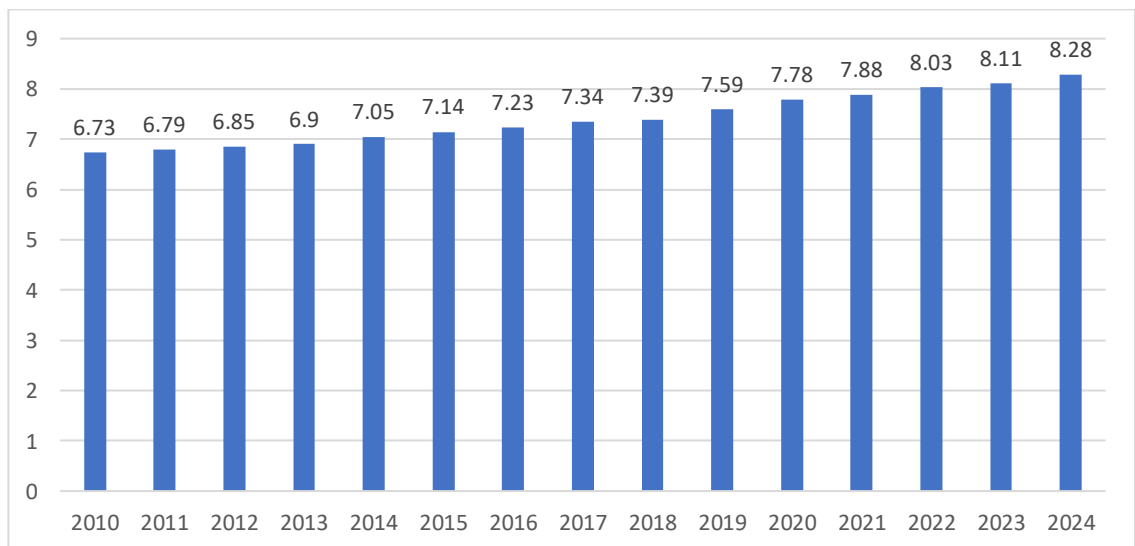
Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 1.1 memperlihatkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Jawa Timur selama periode 2010–2024 yang secara umum menunjukkan kecenderungan peningkatan, meskipun disertai dengan fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Realisasi PMDN pada periode

2010–2014 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dari Rp8.084,1 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp38.132,0 miliar pada tahun 2014. Selanjutnya, pada periode 2015–2019, PMDN cenderung mengalami fluktuasi dengan penurunan pada tahun 2018, sebelum kembali meningkat pada tahun 2019. Memasuki periode 2020–2024, PMDN menunjukkan peningkatan yang relatif konsisten dan signifikan, terutama setelah tahun 2020, dengan nilai tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar Rp92.410,1 miliar, yang mencerminkan penguatan investasi domestik di Jawa Timur. Sementara itu, realisasi PMA juga memperlihatkan pola yang fluktuatif namun cenderung meningkat dalam jangka panjang. Pada periode 2010–2013, PMA mengalami peningkatan cukup tajam hingga mencapai US\$3.396,3 juta pada tahun 2013. Namun, pada tahun berikutnya PMA mengalami penurunan dan fluktuasi, termasuk penurunan cukup tajam pada tahun 2019 dan kembali melemah pada tahun 2020 yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan pandemi COVID-19. Pada periode pascapandemi, khususnya sejak tahun 2021 hingga 2024, PMA kembali menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dengan nilai tertinggi pada tahun 2023 sebesar US\$4.741,0 juta, meskipun sedikit menurun pada tahun 2024.

Perkembangan Realisasi PMDN dan PMA yang relatif meningkat di Provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya potensi perluasan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor. Namun, manfaat investasi tersebut tidak serta-merta dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin, apabila tidak didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai. Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang. Peran tersebut dapat terjadi secara tidak langsung

melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja, serta secara langsung melalui pembekalan keterampilan kepada kelompok penduduk miskin agar mampu meningkatkan kapasitas kerjanya. Peningkatan produktivitas ini pada akhirnya berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat (Surbakti *et al.*, 2023). Selain itu, pendidikan merupakan sarana utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui proses pendidikan, individu memperoleh pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, pendidikan dapat dipandang sebagai bentuk investasi pembangunan yang manfaatnya baru dirasakan dalam jangka panjang (Deswita *et al.*, 2022) .



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.3 Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2024

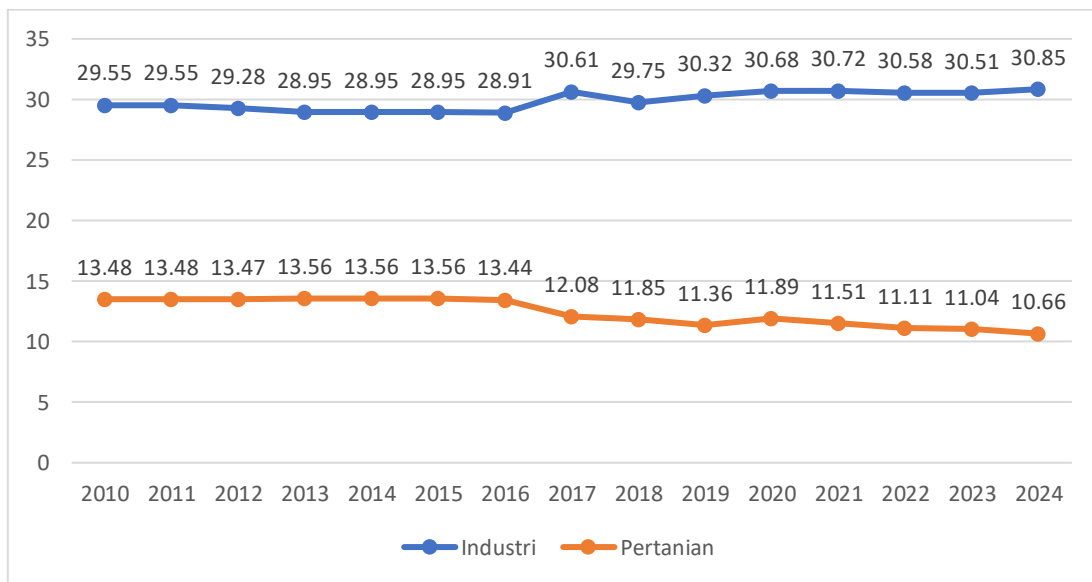
Gambar 1.3 menunjukkan perkembangan kondisi rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Timur selama periode 2010-2024. Perkembangan rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap

tahun. Pada tahun 2010, rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 6,73 tahun, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 8,28 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan akses dan partisipasi pendidikan masyarakat dari waktu ke waktu. Kenaikan yang relatif stabil setiap tahun mencerminkan adanya kemajuan pembangunan di sektor pendidikan, baik melalui perluasan akses sekolah, program wajib belajar, maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Secara ekonomi, peningkatan rata-rata lama sekolah ini mengindikasikan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dalam jangka panjang berpotensi meningkatkan produktivitas tenaga kerja, pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan.

Perubahan struktur ekonomi juga memiliki peran penting dalam menjelaskan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Perbedaan kontribusi antara sektor modern dan sektor tradisional mencerminkan proses transformasi struktural yang memengaruhi kemampuan perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Suselo, 2008). Daerah yang masih didominasi oleh sektor berproduktivitas rendah cenderung memiliki keterbatasan kesempatan kerja dan tingkat pendapatan yang rendah, sehingga berpotensi mempertahankan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, sebaliknya, daerah dengan struktur ekonomi yang lebih berkembang dan didominasi sektor industri serta jasa cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi, sehingga mampu menciptakan peluang kerja yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sulaiman, 2021).

Menurut teori pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh W. Arthur Lewis (1954), menjelaskan bahwasanya pembangunan ekonomi berlangsung melalui

proses perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional yang berproduktivitas rendah menuju sektor modern yang lebih produktif, dimana sektor modern dalam menyerap tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara bertahap menurunkan tingkat kemiskinan (Lestari, 2018).



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Sektor Industri dan Pertanian Provinsi di Jawa Timur Tahun 2010-2024

Berdasarkan Gambar 1.3, terlihat bahwa distribusi persentase PDRB sektor industri di Provinsi Jawa Timur selama periode 2010–2024 cenderung berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian. Kontribusi sektor industri relatif stabil dan bahkan menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama setelah tahun 2017 hingga mencapai kisaran di atas 30 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri menjadi salah satu sektor dominan dalam struktur perekonomian Jawa Timur. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian menunjukkan tren yang cenderung menurun dari waktu ke waktu, dimana sektor pertanian masih berada

di kisaran 13 persen, namun secara bertahap mengalami penurunan hingga berada di sekitar 10 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya pergeseran peran sektor pertanian dalam struktur ekonomi daerah. Perbedaan kontribusi antara kedua sektor tersebut menunjukkan adanya proses transformasi struktural, yaitu pergeseran dari sektor tradisional menuju sektor modern.

Penelitian yang dilakukan oleh Miftaah Nur Faritz (2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu menekan tingkat kemiskinan. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Prehatin & Choiri, (2025) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Selain itu, penelitian Mira Hastin dan Ferry Siswadhi (2021) menunjukkan bahwa investasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Akan tetapi, Febby Irma Fazaryani (2022) menemukan bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Penelitian oleh Utami dan Udjiyanto (2023), menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, yang berarti peningkatan tingkat pendidikan mampu menurunkan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, terdapat perbedaan hasil penelitian yang ditemukan oleh Kartika Berliani (2021), yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pendidikan terhadap kemiskinan masih belum konsisten. Selain itu, penelitian terdahulu masih berfokus pada variabel makroekonomi tanpa mempertimbangkan karakteristik struktur ekonomi suatu

wilayah. Dengan ini, kebaruan penelitian ini terletak pada penambahan variabel karakteristik struktur ekonomi yang mencerminkan dominasi kontribusi antara PDRB sektor industri dan sektor pertanian, yang diproksikan menggunakan variabel dummy untuk melihat perbedaan struktur ekonomi daerah terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pendidikan, dan Karakteristik Struktur Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010–2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian serta latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi jawa timur tahun 2010-2024?
2. Apakah investasi berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi jawa timur tahun 2010-2024?
3. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi jawa timur tahun 2010-2024?
4. Apakah terdapat perbedaan kemiskinan antara daerah sektor industri dan pertanian di provinsi jawa timur tahun 2010–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi jawa timur tahun 2010-2024?
2. Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap kemiskinan di provinsi jawa timur tahun 2010-2024?
3. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di provinsi jawa timur tahun 2010-2024?
4. Untuk menganalisis perbedaan kemiskinan antara daerah sektor industri dan pertanian di provinsi jawa timur tahun 2010–2024?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan mengenai pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, diharapkan dapat memberikan penulis cara untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama melaksanakan studi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam memahami faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi kemiskinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.